

ABSTRAK

Konflik pertanahan sering kali terjadi karena adanya sebuah benturan kepentingan antara siapa dengan siapa. Sadar akan pentingnya tanah untuk tempat tinggal atau kepentingan lainnya menyebabkan tanah yang tidak jelas kepemilikannya diperebutkan bahkan ada yang sudah jelas kepemilikannya pun masih ada yang diperebutkan. Dari sudut pandang politik, latar belakang dan pola interaksi kepentingan menjadi sangat menarik untuk diteliti. Dimana adanya stakeholder yaitu state yang diwakilkan oleh TNI AD, economic state yaitu pengusaha dan civil society yaitu masyarakat.

Metode yang digunakan untuk mengidentifikasi kasus ini ialah menggunakan metode penelitian kualitatif atau wawancara, dengan tujuan memudahkan penulis agar dapat memperoleh data. Dalam hal ini penulis menggunakan teori konflik sosial, konflik pertanahan, dan politik pertanahan sebagai pegangan untuk membongkar dan mengidentifikasi permasalahan konflik pertanahan di kawasan Lahan Gunung Sari di Kota Surabaya. Penulis dalam hal ini melihat adanya berbagai aspek dalam bidang ilmu politik, yang pertama aspek konflik dan proses politik yaitu tahap koalisi, yang kedua aspek kekuasaan, yang ketiga aspek legitimasi. Dimana legitimasi sebuah institusi negara atau pembuat keputusan politik menjadi penting dalam proses penyelenggaraan negara.

Kata kunci : Teori Konflik Sosial